

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi, dalam instansi maupun perusahaan terus menerapkan bagaimana sebuah proses berjalan sesuai dengan tepat guna dan tepat waktu. Ditandai dengan pesatnya arus informasi dan pentingnya pengolahan informasi serta data dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, perkembangan dan organisasi yang mampu menggunakan teknologi informasi baru semakin meningkat, yang berkontribusi pada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas.² teknologi informasi memegang peranan penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi berbagai aspek administrasi pemerintahan, termasuk dalam penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah.

Barang milik daerah merupakan aset yang sangat berharga bagi pemerintahan daerah, yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat optimal bagi pelayanan publik.³ Penatausahaan dan pengelolaan yang tidak optimal dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kehilangan aset, kerusakan, ataupun ketidaktepatan dalam pencatatan aset. Oleh karena itu,

² Anastasia Biantong dan Anastasia Jumriaty Biantong, "Manajemen Pengelolaan Aset Daerah Berbasis Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah" (Kota Malang, 2022).

³ Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa, dan Nuraeni Sayuti, "Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara," *Jurnal Administrasi Negara Vol. 26, No. 3 (2020): 304–325.*

penerapan SIMBADA diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan solusi yang komprehensif dan sistematis.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset properti dan permukiman, sangat memerlukan sistem yang handal untuk memastikan aset-aset yang dimilikinya tercatat dengan baik, terjaga, dan dapat dioptimalkan penggunaannya.⁴ Dalam konteks ini, penerapan SIMBADA diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan SIMBADA terhadap penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana sistem ini berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset, serta bagaimana sistem ini dapat meminimalisir berbagai masalah yang sebelumnya sering terjadi dalam proses penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam manajemen aset dapat meningkatkan akurasi data, transparansi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik.⁵ Namun,

⁴ Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa, dan Nuraeni Sayuti, "Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara," *Jurnal Administrasi Negara* Vol. 26, No. 3 (2020): 304–325.

⁵ Rika Sapriyan dan Laylan Syafina, "Analisis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Pada Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*/Vol 7, no. 4 (2022).

implementasi SIMBADA juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam penggunaan teknologi, resistensi terhadap perubahan, dan kebutuhan akan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai.⁶

Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan SIMBADA serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah melalui penerapan SIMBADA. Hal tersebut bisa dilihat dalam penatausahaan dan pengelolaan laporan inventarisasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.

LAPORAN INVENTARISASI										
01/01/2022 s.d. 31/12/2022 (Semester Final)										
Propinsi : Jawa Timur					Kepemilikan : 12 - Pemerintah Kab / Kota					
Kab/Kota : Kabupaten Kediri					Komptabel : 01 - Intrakomptabel					
Lokasi : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
No	Kode Register/ Kode Neraca	Nama Barang	Merk/Alamat/Type	Tahun Pengadaan	Jumlah Barang	Harga Satuan/ Harga Total	Kondisi			Keterangan
							B	RR	RB	
1	No. & Tgl. Penetaraan: 028/663/418.32/2022 - 25/01/2022									
	1.3.1.01.03.07.009.000052	Tanah untuk jalan perumahan	Perumahan Mutiara Pare Residence Blok B Desa Pare Kec. Pare	2000	1	782.300.000,00	1	0	0	
	1.3.1.01.03.07.009.000053	Tanah untuk jalan perumahan	Perumahan Mutiara Pare Residence B-GRJ Desa Pare Kec. Pare	2000	1	111.100.000,00	1	0	0	
	1.3.1.01.03.07.009.000054	Tanah untuk jalan perumahan	Perumahan Mutiara Pare Residence Blok A Desa Pare Kec. Pare	2000	1	111.600.000,00	1	0	0	
	1.3.1.01.03.07.009.000055	Tanah untuk jalan perumahan	Perumahan Mutiara Pare Residence Blok A Desa Pare Kec. Pare	2000	1	56.800.000,00	1	0	0	
	1.3.1.01.03.07.009.000056	Tanah untuk jalan perumahan	The Green Mansion Desa Pare Kec. Pare	2000	1	290.700.000,00	1	0	0	
	1.3.1.01.03.07.009.000057	Tanah untuk jalan perumahan	Perumahan Mutiara Pare Residence Blok B Desa Pare Kec. Pare	2000	1	32.000.000,00	1	0	0	
	1.3.1.01.03.07.009.000058	Tanah untuk jalan perumahan	Perumahan Mutiara Pare Residence Blok B	2000	1	22.800.000,00	1	0	0	
	1.3.1.01.03.07.009.000059	Tanah untuk jalan perumahan	Perumahan Mutiara Pare Residence Blok B Desa Pare Kec. Pare	2000	1	13.000.000,00	1	0	0	
	1.3.1.01.03.07.009.000060	Tanah untuk jalan perumahan	Perumahan Mutiara Pare Residence B-GRJ Desa Pare Kec. Pare	2000	1	3.800.000,00	1	0	0	
	1.3.1.01.03.07.009.000061	Tanah untuk jalan perumahan	Perumahan Mutiara Pare Residence Blok A Desa Pare Kec. Pare	2000	1	6.000.000,00	1	0	0	
	1.3.1.01.03.07.009.000062	Tanah untuk jalan perumahan	The Green Mansion Desa Pare Kec. Pare	2000	1	34.900.000,00	1	0	0	
	1.3.1.01.03.07.009.000063	Tanah untuk jalan perumahan	The Green Mansion Desa Pare Kec. Pare	2000	1	8.400.000,00	1	0	0	

Gambar 1. 1 Laporan Inventarisasi Daerah

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri

⁶ Bahtiar Efendi Romandhon Romandhon, Diki Setiyadi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)," *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology Vol. 5 No. (n.d.)*, <https://doi.org/https://doi.org/10.32500/jematech.v5i1.21-49>.

Proses peningkatan instansi atau perusahaan pasti memiliki hubungan yang erat dengan sebuah Sistem Informasi Manajemen (SIM), karena sistem informasi manajemen merupakan aplikasi yang menunjang kinerja perusahaan dimana sangat diharapkan mampu berkontribusi dalam memberikan keputusan termasuk informasi maupun proses operasional perusahaan.⁷ Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat membantu dalam mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan operasional, keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Dengan adanya SIM, instansi atau perusahaan dapat memperoleh informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan secara tepat. Teknologi tersebut sudah mulai diterapkan dalam instansi pemerintah daerah tentang penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dan nyata dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan ini membawa konsekuensi kepada pemerintah daerah untuk mencari sendiri sumber-sumber pendapatan bagi pembangunan daerahnya sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada untuk membiayai belanja rutin atau belanja pembangunan di daerah tersebut.⁸ Oleh sebab itu daerah perlu ada pelaksanaan penatausahaan aset pemerintah daerah sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

⁷ Aptika, "Keamanan Jaringan Internet dan Firewall," *Ditjen Aplikasi Informatika*, 2017, <https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/keamanan-jaringan-internet-dan-firewall/>.

⁸ BKAD, "Pengoptimalan Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah," *BKAD Kulon Progo*, 2021, <https://bkad.kulonprogokab.go.id/detil/1659/pengoptimalan-pengelolaan-dan-pemanfaatan-barang-milik-daerah>.

Oleh karena itu, disini Pemerintah Kabupaten Kediri khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merubah pola sistem pengelolaan yang lama (manual) dengan menerapkan sebuah Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah atau SIMBADA dalam proses pengelolaan aset daerah terutama pada bagian penatausahaan. Sistem ini memegang peranan penting dalam proses pengelolaan aset Pemerintah daerah, karena dengan adanya sistem informasi barang daerah pengelolaan aset akan lebih tertata, akuntabel, dan transparan serta dapat mengurangi beban kerja pada semua bidang dalam Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.

Salah satu inovasi penting yang diimplementasikan adalah Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). SIMBADA adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola aset-asetnya secara lebih terintegrasi, akurat, dan transparan. SIMBADA merupakan salah satu teknologi informasi yang berhubungan dengan *database*.⁹ SIMBADA Kabupaten Kediri mempunyai pengaruh sebagai sistem informasi di dalam manajemen pengelolaan aset daerah kemudian dapat disampaikan dalam bentuk evaluatif atau pelaporan, yang mampu mengurai informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan menalaah permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan. Tujuan Sistem Informasi Manajemen

⁹ Aptika, "Keamanan Jaringan Internet dan Firewall," *Ditjen Aplikasi Informatika* (2017) <https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/keamanan-jaringan-internet-dan-firewall/>. Ibid. Ibid. Ibid. Ibid. Aptika, "Keamanan Jaringan Internet dan Firewall," *Ditjen Aplikasi Informatika*, 2017, <https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/keamanan-jaringan-internet-dan-firewall/>.

Barang Daerah (SIMBADA) ini adalah untuk meningkatkan pelaporan keuangan aset daerah secara rinci dan memudahkan pengaksesan data aset daerah.

Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 14 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Maka dari itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri tidak hanya mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah saja, tetapi juga harus memaksimalkan pengelolaan aset daerah.¹⁰ Namun dalam sistem ini masih belum maksimal dalam penatausahaan dan pengelolaannya sehingga ada beberapa kendala yang sering dihadapi. Salah satu kendala yang sering dihadapi pengguna aplikasi SIMBADA adalah kesalahan dalam penginputan data pada penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah. Selain itu, aplikasi SIMBADA perlu diperbaiki sehingga memudahkan para pengguna sistem ini berjalan dengan baik dan efektif. Dengan memahami beberapa kendala yang terjadi, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan barang milik daerah dan memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi.

Berdasarkan uraian diatas pentingnya sistem informasi manajemen barang daerah dalam memperoleh kepuasan pelayanan publik serta akuntabilitas

¹⁰ Ivan Hari Putra Slamet Usman Ismanto, dan Nunung Runiawati, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung," *JANE (Jurnal Administrasi Negara) Volume 14* (2022): 238–255, <https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/view/41311>.

lembaga pemerintahan, dengan memberikan pencapaian hasil yang optimal dan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penatausahaan dan pengelolaan aset daerah. Terutama dalam proses penginputan data aset daerah yang masih menjadi salah satu masalah dalam pengelolaan barang dan aset daerah di kabupaten Kediri.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Terhadap Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kediri”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang bisa diidentifikasi terkait pengaruh Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) terhadap penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri. Dimana hal tersebut dapat terjadi karena adanya kesalahan-kesalahan seperti kesalahan penginputan data atau yang lain dalam penatausahaan dan pengelolaannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) terhadap penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) terhadap pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji pengaruh antara Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) terhadap penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.
2. Untuk menguji pengaruh antara Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) terhadap pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan pengaruh Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) terhadap penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Kediri.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan berguna untuk mengaplikasikan ilmu serta menambah pengetahuan tentang Sistem Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) terhadap penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah.

b. Bagi Lembaga

Bisa digunakan untuk bahan evaluasi dan masukan bagi pihak yang bersangkutan, supaya Sistem Informasi Manajemen Barang Dearah (SIMBADA) ini bisa lebih baik dalam penatausahaan dan pengelolaannya.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Bisa digunakan untuk menambah referensi, wawasan, dan pengetahuan, masukan atau acuan dalam kegiatan penelitian lanjutan.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang variabel-variabel yang diteliti, membatasi permasalahan yang akan diteliti dan lokasi penelitian sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki. Adapun ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) terhadap penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.
- b. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kabupaten Kediri.
- c. Responden atau subjek pada penelitian ini adalah seluruh staff atau pegawai pengguna Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah penelitian ini serta memahami pokok-pokok uraian, maka penulis mengemukakan pengertian dari judul “Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) terhadap Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kediri” sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Sedangkan variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini yaitu penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah.

- a. Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) adalah sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola informasi terkait dsistem ini dengan pengelolaan barang milik daerah. Sistem ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam pemantauan, pengendalian, dan pengelolaan barang milik daerah secara efisien dan transparan.
- b. Penatausahaan barang milik daerah adalah proses pencatatan, pengelolaan, dan pemeliharaan barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Proses ini meliputi pemantauan inventaris barang, pencatatan perubahan status barang, perawatan barang, serta pelaporan terkait dengan kondisi dan penggunaan barang milik daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pengelolaan barang milik daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengelola barang-barang

yang dimilikinya secara efisien, transparan, dan akuntabel. Pada pengelolaan barang milik daerah ini mencakup proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan pemusnahan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) (X) sebagai variabel bebas, sedangkan penatausahaan barang milik daerah (Y_1) dan pengelolaan barang milik daerah (Y_2) sebagai variabel terikat.

a. Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) (X)

Definisi operasional Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) merupakan sistem informasi barang daerah yang digunakan pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pengawasan, pencatatan, dan pengelolaan barang daerah secara efektif dan efisien. Adapun indikator SIMBADA antara lain:

- 1) Akurasi dan ketepatan waktu: mengenai informasi yang disajikan oleh sistem secara tepat dan akurat.

- 2) Kelengkapan, relevansi, dan konsistensi: mengenai sistem yang dapat menyajikan informasi secara konsisten dan relevan.
- 3) Kemudahan untuk digunakan, keandalan sistem, dan kecepatan akses: kemudahan saat sistem digunakan dan seberapa cepat pengaksesan saat sistem tersebut digunakan.
- 4) Fleksibilitas sistem dan keamanan sistem: saat sistem tersebut digunakan terdapat petunjuk untuk pengguna baru agar efektif dan mempunyai lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi data.
- 5) Keandalan dan daya tangkap: kemampuan sistem dalam melakukan penyimpanan dan membackup data.
- 6) Jaminan, empati, dan bukti langsung: terdapat jaminan kualitas yang kuat dan terdapat layanan yang baik atau tidak.

b. Penatausahaan Barang Milik Daerah (Y₁)

Definisi operasional penatausahaan barang milik daerah merupakan penatausahaan yang dapat memberikan kebenaran data yang diperoleh dan setiap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib melakukan penatausahaan barang milik daerah yang ada pada pengguna masing-masing.

Adapun indikator penatausahaan barang milik daerah antara lain:

- 1) Penyusunan laporan pertanggungjawaban: mengenai sistem pelaporan dan pencatatannya.
- 2) Pencatatan pada pengguna dan pengelola barang milik daerah: pencatatan yang dilakukan oleh sistem informasi apakah sudah akurat dan lengkap.
- 3) Pendataan inventarisasi barang milik daerah: pada inventarisasi barang milik daerah dan penggunaan visualisasi data mencakup detail seperti kondisi, lokasi, grafik, tabel, dan nilai barang sesuai dengan data yang tersedia.
- 4) Pengawasan dan monitoring: digunakan untuk mengidentifikasi masalah.
- 5) Evaluasi kegiatan pendataan barang milik daerah: hasil evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh dari semua aspek pendataan barang milik daerah.

c. Pengelolaan Barang Milik Daerah (Y₂)

Definisi operasional pengelolaan barang milik daerah merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan daerah.

Adapun indikator pengelolaan barang milik daerah antara lain:

- 1) Tahapan perencanaan kebutuhan: kebutuhan proyek yang sudah diidentifikasi dengan jelas, sesuai tujuan, dan tepat sasaran.
- 2) Perencanaan pengelolaan barang milik daerah untuk mengurangi risiko.
- 3) Rasio penggunaan anggaran terhadap kebutuhan barang: mencakup semua aspek seperti akuisisi, pemeliharaan, dan pengelolaan.
- 4) Tingkat pemenuhan kualitas barang dengan anggaran yang dialokasikan: anggaran yang memadai sesuai dengan kebutuhan operasional dan pemeliharaan barang milik daerah.
- 5) Peningkatan pengendalian: proses pengendalian internal secara berkala.
- 6) Pengawasan barang milik daerah: proses pengawasan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi sesuai yang ditetapkan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

- 1. Bagian awal**, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.
- 2. Bagian isi**, terdiri dari enam bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian ini mengenai variabel-variabel yang akan diteliti yang terdiri dari landasan teori penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel, dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, teknik analisis data, dan definisi konsep dan operasional variabel.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis).

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

- 3. Bagian akhir**, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.